

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) TERHADAP PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DI BPKPAD KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

Muhammad Ferdy Dwi Saputra
NPP. 31.0685

Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Keuangan Publik
Email: mferdydwisaputra@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ika Agustina, SE, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) is an application developed by the Directorate General of Regional Finance, Ministry of Home Affairs, with the aim of accelerating data transfer and increasing efficiency in collecting regional financial data. But in its implementation, there are still obstacles experienced. As a result, the benefits of SIPD have not been fully realized.* **Purpose:** *This research was conducted to find out how the implementation of SIPD in accountability of regional financial management in BPKPAD Banjarmasin City, inhibiting factors in the use of SIPD, and efforts made by BPKPAD Banjarmasin City.* **Method:** *This research is qualitative research with descriptive research methods and through an inductive approach. Data collection techniques are by using observation, interviews, and documentation. The data analysis steps used are data reduction, data presentation, and conclusions.* **Result:** *Based on the results of the research that the author conducted, the use of SIPD in regional financial management has not been optimal. This is due to the lack of quality and quantity of apparatus resources in the use of SIPD, delays in improvements from the center, SIPD applications that have not been maximized.* **Conclusion:** *The Banjarmasin City Government has made an effort to optimize SIPD, namely continuing to conduct training for employees on the operation of SIPD and adding employees at BPKPAD Banjarmasin City, as well as improving and updating facilities and infrastructure. The author's advice for the Banjarmasin City government is to often provide periodic training on SIPD, install antivirus to maintain data security, and always coordinate directly with the center.*

Keywords: *SIPD, Implementation, Accountability, Regional Financial Management*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan mempercepat transfer data dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data keuangan daerah. Namun dalam penerepannya, masih terdapat kendala yang dialami. Dampak dari hal tersebut adalah bahwa manfaat SIPD masih belum tercapai secara maksimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi SIPD dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKPAD Kota Banjarmasin, faktor penghambat dalam penggunaan SIPD, serta upaya yang dilakukan BPKPAD Kota Banjarmasin. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun Langkah analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam penggunaan SIPD, keterlambatan perbaikan dari pusat, aplikasi SIPD yang belum maksimal. **Kesimpulan:** Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan suatu upaya untuk mengoptimalkan SIPD yaitu terus melakukan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian SIPD dan Menambah pegawai di BPKPAD Kota Banjarmasin, serta memperbaiki dan memperbaharui sarana dan prasana. Saran dari penulis untuk pemerintah Kota Banjarmasin yaitu sering memberikan pelatihan berkala mengenai SIPD, memasang antivirus untuk menjaga keamanan data, serta selalu melakukan koordinasi langsung dengan pusat. **Kata kunci:** SIPD, Implementasi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mengubah dinamika interaksi sosial manusia, dan sebagai hasilnya, Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan otomatisasi sistem di berbagai daerah. Upaya ini sejalan dengan semangat inovasi yang terus digelorakan guna memperbaiki layanan dan mekanisme pelayanan publik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government adalah konsep yang mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pertukaran informasi dan keuangan di lingkungan pemerintah. Sistem informasi sendiri menurut Seah dan Ridho (2020), menjelaskan bahwa “Sistem informasi adalah hasil dari keterpaduan berbagai komponen teknologi informasi yang bekerja bersama-sama untuk menciptakan informasi yang berguna, membentuk jalur komunikasi tunggal dalam suatu organisasi atau kelompok”. Sistem Informasi ini merupakan upaya untuk memberikan layanan kepada

masyarakat dengan cara yang lebih efisien, dengan tujuan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi mengenai kinerja pemerintah serta meningkatkan efisiensi operasional pemerintah.

Nurdin (2017) “Pemerintah adalah organisasi, badan, atau lembaga yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan-peraturan serta undang-undang di suatu wilayah tertentu”. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada masa sekarang sangat cocok untuk diterapkan dalam pemerintahan Indonesia saat ini, karena di era digital ini segala hal menjadi mudah di akses, sehingga memudahkan dan mempercepat dalam pelayanan dan pertukaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat. SPBE yang dilaksanakan dengan baik mampu meningkatkan akuntabilitas, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan, Akuntabilitas sendiri merupakan salah satu asas bahwa setiap kegiatan pemerintahan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (Mustopadijaja, 1997).

Setiap daerah diwajibkan untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan dan pembangunan, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan urusannya termasuk pengelolaan keuangan. Menurut Moenek dan Suwanda (2019) menjelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen internal dari manajemen anggaran publik yang melibatkan penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pengawasan pendayagunaan keuangan dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pemerintah provinsi, kabupaten atau kota diharapkan bisa menerapkan SIPD ini dalam pengelolaan keuangan daerah di setiap organisasi perangkat daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejak tahun 2020 dimana penerapan ini bertujuan agar menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam penyajian sebuah laporan keuangan harus lah memberikan informasi yang wajar, dan menyajikan seluruh informasi terkait dengan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Penyajian pengelolaan keuangan di daerah Kota Banjarmasin sudah terselenggara dengan baik, dimana dalam lima tahun terakhir dapat mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan hasil akhir dalam penilaian pengelolaan keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menandakan bahwa laporan keuangan suatu entitas, dalam hal ini Kota Banjarmasin, telah disajikan secara lengkap dan akurat dalam semua aspek yang signifikan, termasuk posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, tanpa adanya pengecualian.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) harus memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dengan memperhatikan peran sistem informasi dalam pengelolaan keuangan, terdapat beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan. Pertama, sistem informasi memudahkan penginputan data, memastikan perhitungan yang tepat, dan meningkatkan kecepatan dalam proses transaksi keuangan. Kedua, sistem ini memberikan efisiensi baik dalam hal waktu maupun biaya. Ketiga, transparansi yang dihasilkan oleh sistem informasi memungkinkan pengendalian anggaran yang lebih baik. Terakhir, sistem ini juga memfasilitasi interaksi antar pegawai yang terlibat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas output, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun dokumen-dokumen penting lainnya. Dari beberapa kendala yang ditemukan dalam penggunaan sistem aplikasi tersebut menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum terlaksana sepenuhnya secara maksimal seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan tentang implementasi SIPD.

Penelitian Tumija, Asep Hendra Marja Sinurat (2023), berjudul Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang, sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala seperti saat penginputan data sering error karena servernya tidak kuat ketika penginputan data secara bersamaan waktunya.

Penelitian Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani (2021), berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan menemukan bahwa Aplikasi SIPD sudah dimanfaatkan oleh BPKAD Kota Medan sebagai bentuk pengimplementasian kebijakan yang diberikan, namun nyatanya masih ada kendala dalam hal ini mengakibatkan banyak pekerjaan dan proses penginputan mengalami penundaan

Penelitian Nidya Vitriana, Agustiawan, Muhammad Ahyaruddin (2022), berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Bagian Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah BPKAD Pekanbaru menemukan bahwa Pelaksanaan SIPD di Kota Pekanbaru yang tujuannya digunakan untuk mendukung dan mempermudah pengelolaan keuangan daerah namun masih kurang efektif

Penelitian Citta Nadya (2020), berjudul Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Daerah Kota Manado menemukan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Data (SIPD) SIPD memberikan nilai positif dengan

menyelaraskan perencanaan pembangunan di seluruh Indonesia, memfasilitasi sistem data dan informasi untuk pengambilan keputusan, dan memperkuat kerja sama pemerintah daerah berbasis informasi akurat.

Penelitian Oliver David Opouw (2020), berjudul *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Covid 19 di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara* menemukan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) di pemerintah daerah Kota Tomohon merupakan sebuah langkah inovatif untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Penelitian Kevin Tumbur Situmorang (2023), berjudul *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan* menemukan bahwa Penerapan SIPD di Kota Banjarmasin tidak selalu berjalan dengan lancar ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPKPAD Kota Banjarmasin yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, keterlambatan dalam mensosialisasikan aplikasi dan regulasi SIPD yang terbaru, dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Penelitian Ida Farida, Refly Setiawan, Anastasia Sri M., Masayu Nila Juwita (2020), berjudul *The Implementation of E-Government in the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia* menemukan bahwa Pengembangan sistem aplikasi pemerintahan mulai meningkat secara kuantitas, tetapi dalam hal kualitas masih belum memadai karena implementasinya tidak merata di semua wilayah dan masih berfungsi sebagai penyedia informasi statis saja.

Penelitian Lubna Salsabila dan Eko Priyo Purnama (2019), berjudul *Establishing and Implementing Good Practices E-Government (A Case Study: e-Government Implementation between Korea and Indonesia)* menemukan bahwa Indonesia seharusnya mengadopsi beberapa prinsip yang diterapkan oleh Korea Selatan dalam proses praktik e-Government. Dengan konsisten pada salah satu kebijakan atau program akan menciptakan dampak besar. Program yang selalu berubah seiring dengan perubahan pemimpin tidak akan menciptakan perubahan apapun.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian sejenis telah dilakukan Situmorang. Penelitian ini menurut hemat kami mempunyai perbedaan substansial dengan penelitian yang kami lakukan terutama terkait dengan waktu pelaksanaan penelitian. Situmorang meneliti disaat aplikasi baru saja diterapkan sedangkan penelitian kami dilakukan dua tahun setelah diterapkan. Dengan demikian data yang kami dapatkan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SIPD lebih komprehensif dan reliable.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi SIPD dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKPAD Kota Banjarmasin, faktor

penghambat dalam penggunaan SIPD, serta upaya yang dilakukan BPKPAD Kota Banjarmasin.

II. METODE

Penulis menggunakan model implementasi kebijakan ketiga, yang dipandang dari perspektif top-down, dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Leo Agustino 2016:136-141). Teori ini terdiri dari beberapa dimensi yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif (Hardani, 2020:18) Penelitian ini akan fokus pada pemahaman mendalam kepada permasalahan yang ada, dengan tujuan menjelaskan fakta-fakta mengenai masalah yang diselidiki sebagaimana adanya. Peneliti akan menyelidiki secara menyeluruh permasalahan yang terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dengan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kota Banjarmasin. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis, memungkinkan penarikan kesimpulan yang relevan. Pendekatan induktif akan diterapkan dengan mengumpulkan data atau fakta yang nyata dari pengalaman lapangan, melalui observasi dan analisis terhadap masalah-masalah yang muncul. Data-data tersebut akan dianalisis dan diinterpretasikan secara cermat, dengan tujuan membentuk gambaran atau deskripsi yang komprehensif tentang permasalahan yang sedang diteliti. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan Teknik purposive sampling (Sugiyono, 2016:218) terhadap 5 orang informan yang terdiri dari, Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Sekretaris BPKPAD Kota Banjarmasin, Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Kota Banjarmasin, Kepala Subbid Penyusunan Regulasi Teknis BPKPAD Kota Banjarmasin, Operator SIPD BPKPAD Kota Banjarmasin. Adapun analisisnya menggunakan analisis kualitatif Model Miles dan Huberman (dalam Hardani, 2020) yang terdiri dari beberapa aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKPAD Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada penelitian ini membahas tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin yang menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward (Teori Edward III). Teori ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan implementasi, yang meliputi:

3.1.1. Komunikasi

Edward III dalam teori Implementasi menyoroti tiga aspek penting dalam proses komunikasi, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu kebijakan tepatnya mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga akuntabilitas Keuangan dapat tercapai. Sarana dan prasarana yang mencakup fasilitas teknologi memegang peran penting dalam menjalankan komunikasi efektif. Penting untuk memanfaatkan teknologi yang ada untuk memfasilitasi proses komunikasi. Komunikasi yang efektif juga menuntut interaksi dua arah agar informasi dapat disampaikan dengan tepat dan terhindar dari kesalahan pemahaman atau miskomunikasi.

Berdasarkan analisis terhadap tiga indikator dalam dimensi komunikasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin proses transmisi atau penyebaran informasi serta jelasnya perintah dari pimpinan kepada pelaksana SIPD sendiri sudah berjalan dengan baik, Meskipun demikian, ditemukan kekurangan dalam hal konsistensi, dimana masih terdapat kendala yang mengakibatkan kurangnya konsistensi dalam proses komunikasi. Kendala tersebut sering kali disebabkan oleh kebutuhan untuk menyesuaikan dengan arahan dan kebijakan yang berasal dari tingkat pusat, sehingga seringkali terjadi perubahan-perubahan dalam keputusan yang diambil.

3.1.2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan faktor penting dalam terlaksananya suatu kebijakan. Oleh sebab itu, sumber daya ini harus dikelola secara baik untuk dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pada setiap OPD sehingga melahirkan pegawai yang berkompeten dan berkualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan dibidangnya. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: Staf, Informasi, Wewenang, Fasilitas

Berdasarkan analisis terhadap empat indikator dalam dimensi sumber daya, dapat disimpulkan bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin sudah memiliki operator yang berkualitas. Informasi yang diperoleh dari SIPD juga dinilai sangat baik dan bermanfaat dalam pengelolaan keuangan. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, di antaranya adalah pelatihan yang diberikan masih terbatas dari pemerintah pusat, seringkali hanya ditujukan kepada perwakilan dari masing-masing Organisasi perangkat daerah (OPD), tanpa mencakup seluruh pegawai. Selain itu, penambahan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kinerja SIPD dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

3.1.3. Disposisi

Disposisi, sebagai faktor ketiga, memiliki implikasi yang signifikan terhadap implementasi kebijakan yang efektif dan efisien. Menurut Edward, keberhasilan

pelaksanaan suatu kebijakan tergantung pada dukungan dari para pelaksana. Adapun yang menjadi indikatornya yaitu : Pengangkatan Birokrat, intensif. Berdasarkan analisis terhadap dua indikator dalam dimensi disposisi, dapat disimpulkan bahwa di BPKPAD Kota Banjarmasin, pengangkatan birokrat dan penempatan pegawai didasarkan pada keahlian dan kemampuan mereka. Namun, terkait mutasi pegawai, masih ada temuan bahwa pegawai yang mengalami mutasi harus menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsinya masing-masing karena belum sepenuhnya menguasai bidang tersebut. Selain itu, insentif menjadi elemen penting yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan semangat kerja. Para operator akan menerima biaya insentif jika mereka bekerja melebihi batas waktu yang ditetapkan atau lembur.

3.1.4. Struktur Birokrasi

Edward III menyatakan bahwa birokrasi merupakan salah satu entitas yang seringkali, bahkan secara menyeluruh, bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Adapun yang menjadi indikatornya adalah: SOP (Standar Operasional Prosedur), Fragmentasi. Berdasarkan analisis terhadap dua indikator dalam dimensi struktur organisasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa di Badan BPKPAD Kota Banjarmasin Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi, dan penerapan SIPD telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dan kerjasama antara kepala badan dan bidang di bawahnya telah berjalan dengan baik, dan arahan dari pimpinan dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh pegawai.

3.2. Faktor penghambat yang memengaruhi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKPAD Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2.1. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur dari apa yang Diharapkan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SDA di BPKPAD masih belum memahami aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara maksimal, dan juga masih kekurangannya sumber daya dalam suatu bidang. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapat perhatian serius dengan melaksanakan bimbingan teknis secara berkala, dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, perlunya pertimbangan untuk menambah jumlah staf agar sumber daya manusia, khususnya pegawai yang bertugas menjalankan aplikasi SIPD, dapat bekerja sesuai dengan harapan dan tugas yang diemban.

3.2.2. Keterlambatan Perbaikan dari Pusat

Berdasarkan wawancara diatas menurut penulis, hal tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi kesalahan dalam penginputan dalam SIPD perlu dilakukannya komunikasi dan koordinasi dengan operator pusat untuk perbaikannya agar proses

pengelolaan keuangan dalam SIPD berjalan dengan maksimal, namun nyatanya respon pusat saat terjadinya kendala ataupun laporan perbaikan masih terbilang cukup lambat.

3.2.3. Aplikasi SIPD RI Yang Belum Maksimal

Dari hasil wawancara diatas diperkuat juga dari hasil observasi penulis dalam mengoperasikan SIPD RI yang dimana tampilannya yang berbeda dengan versi sebelumnya, dan memang mengalami bug. Dapat disimpulkan bahwa SIPD RI masih bermasalah dalam pengoperasiannya, beberapa menu yang ditampilkan tidak berjalan sesuai dengan harapan dan fungsinya. Sehingga penginputan transaksi dan data keuangan menjadi terhambat. Perlunya tindakan lebih lanjut dari pemerintah pusat dalam melakukan update atau perbaikan. Aplikasi yang sudah dibuat dan diperbaharui yang seharusnya menjadi tolak ukur menjadi lebih baik ternyata memiliki kendala yang mengganggu terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan.

3.3. Upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

3.3.1. Terus Melakukan Pelatihan Untuk Pegawai Mengenai Pengoperasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dan Menambah Pegawai Di BPKPAD Kota Banjarmasin

Pelatihan memang sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang sesuatu. Memberikan pelatihan bagi pegawai tentang cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dengan harapan pegawai memiliki kemahiran dan kemampuan dalam menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sehingga meningkatkan efektivitas penggunaan Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.3.2. Melakukan Koordinasi Langsung dengan Pusat

Dari pernyataan tersebut, penulis memahami bahwa pusat menerima banyak permintaan perbaikan data, sehingga koordinasi melalui media sosial tidaklah efektif, terutama untuk keluhan dan permintaan perbaikan yang berasal dari seluruh Indonesia. Di sisi lain, koordinasi yang dilakukan dengan langsung mendatangi Kemendagri sangatlah efektif, tetapi memiliki kekurangan yaitu membutuhkan biaya dan waktu yang lama dalam menindaklanjuti kesalahan dan permintaan perbaikan data.

3.3.3. Melakukan perbaikan, pemeliharaan dan pembaharuan sarana dan prasarana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pemerintah Kota Banjarmasin juga berupaya untuk memperbaiki kerusakan pada sistem maupun pada fasilitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemerintah juga akan mengganti fasilitas yang sudah tidak bisa digunakan lagi.

Tidak hanya itu, untuk memperlancar penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan untuk meningkatkan keefektivannya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin pada saat ini lebih memperhatikan Fasilitas pendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) seperti perangkat komputer dan juga jaringan internet.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) bertujuan untuk mengelola informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah secara terhubung guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Namun, dalam implementasinya di BPKPAD Kota Banjarmasin masih ditemukan masalah salah satunya terkait kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum memenuhi harapan. Berdasarkan analisis wawancara, disimpulkan bahwa aparatur di BPKPAD masih belum memahami aplikasi SIPD secara maksimal dan kekurangan tenaga ahli di bidang tertentu. Meskipun BPKPAD Kota Banjarmasin sudah memiliki operator berkualitas dan informasi dari SIPD dinilai sangat baik serta bermanfaat dalam pengelolaan keuangan, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah pusat masih terbatas dan seringkali hanya ditujukan kepada perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga tidak mencakup seluruh pegawai. Selain itu, diperlukan penambahan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kinerja SIPD dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Permasalahan ini juga sejalan dengan penelitian oleh Farida dkk. (2020) yang berjudul "*The Implementation of E-Government in the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia*" yang menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia masih menjadi hambatan dalam implementasi sistem aplikasi di pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan kesuksesan implementasi sistem aplikasi di sektor pemerintahan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa terhadap data dan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik Kesimpulan Implementasi SIPD Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan Teori Edwards III namun ada beberapa kendala pada beberapa dimensi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan analisis tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor Penghambat yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin dalam mengelola keuangan daerah yaitu antara lain: Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur dari apa yang diharapkan, Keterlambatan Perbaikan dari Pusat, Aplikasi SIPD RI Yang Belum Maksimal. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin dalam

menghadapi hambatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKPAD Kota Banjarmasin dalam mengelola keuangan daerah adalah sebagai berikut: Terus Melakukan Pelatihan bagi Pegawai Mengenai Pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan menambah Pegawai di BPKPAD Kota Banjarmasin, Melakukan Koordinasi Langsung dengan Pusat, Melakukan perbaikan, pemeliharaan dan pembaharuan sarana dan prasarana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu SKPD sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Bertolak dari beberapa kesimpulan yang penulis kemukakan maka saran dari penulis untuk meningkatkan akuntabilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Mengadakan Pelatihan Berkala Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi admin, operator baik di pusat maupun di daerah dan modul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang bisa dipelajari oleh operator. Melakukan perbaikan pada fasilitas sistem yang rusak, serta memasang antivirus untuk menjaga keamanan data. Diharapkan respon yang cepat oleh operator pusat dalam menangani permasalahan via online. Diharapkan agar Kementerian Dalam Negeri dapat menyempurnakan SIPD terutama dalam tampilan dan fungsi menu-menu

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BPKPAD Kota Banjarmasin serta seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Farida, I., Setiawan, R., Maryatmi, A., & Juwita, M. (2020). The Implementation of E-Government in the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologic*.
- Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitaif. In *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitaif* (Vol. 53, Issue 9). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadijaja. (1997). *Civil Society*. Ghalia Indonesia.
- Nadya, C. (2020). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Daerah Kota Manado*.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset*

Daerah (BPKAD) Kota Medan.

- Nuridin, I. (2017). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan. In *Sosiohumanitas*. Lintang Rasi Aksara.
- Opouw, O. D. (2020). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Covid 19 di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.*
- Salsabila, L., & Purnama, E. P. (2019). Establishing and Implementing Good Practices E-Government (A Case Study: e-Government Implementation between Korea and Indonesia). *Jurnal Of Asian Review Of Public Affairs And Policy*.
- Seah, J., & Ridho, M. R. (2020). Perancangan Sistem Informasi Persediaan Suku Cadang untuk Alat Berat Berbasis Desktop pada Cv Batam Jaya. *Comasie*, 3(2).
- Situmorang, K. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tumija, Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*.
- Vitriana, N., Agustiawan, & Ahyaruddin, M. (2022). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Bagian Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah BPKAD Pekanbaru.*

